



<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jwp>

PERAN KOMITE MADRASAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI MTS.s MOTI VERBOND, TERNATE

Yusri A. Boko¹, Fahmi Djaguna²

¹STKIP Kie Raha Ternate, Jl. Stkip kie raha, Sasa, Kec. Ternate Sel., Kota Ternate, Maluku Utara.

²Universitas Pasifik Morotai, Daruba, Kec. Morotai Sel., Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.

Email: yusriaboko@stkip.ac.id

ABSTRACT

The problem with school management today is that many people still ignore the role of the committee. Even though the committee has an extraordinary role in improving quality. This study aims to describe the role of the Moti Verbond private MTs Committee in improving quality. This research is a qualitative research. Data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews, observation and document study. Testing the validity of the data is triangulation, data reduction, and drawing conclusions. The results of the study show that in improving quality there are things that are going well, even though they are running according to the conditions, a) the role of mediator (agency mediator) can be said to be working even though there are still many shortcomings. Because until now the committee's mediation regarding student deficiencies has not yielded results, b) the role of the advisory committee has been going well. The madrasah committee in carrying out its role as a provider of quality support is still limited to providing motivation, the committee only provides support, c) the role of the committee as a controller has not directly touched schools.

Keywords: The Role of the Madrasah Committee, Quality Improvement, MTS.s Moti Verbond

ABSTRAK

Problem pengelolaan sekolah saat ini karena banyak yang masih mengabaikan peran komite. Padahal komite memiliki peran yang luar biasa dalam meningkatkan mutu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Komite MTs swasta Moti Verbond dalam meningkatkan mutu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Pengujian keabsahan data ialah triangulasi, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam meningkatkan mutu ada yang berjalan sudah baik, meskipun berjalan sesuai dengan kondisi, a) peran sebagai mediator (mediator agency) bisa dikatakan berjalan meskipun masih banyak kekurangan. Karena sampai saat ini mediasi komite tentang kekuarangan siswa belum menuai hasil, b) peran komite pemberi pertimbangan (advisory agency) telah berjalan dengan baik. Komite madrasah dalam menjalankan peran sebagai pemberi dukungan mutu masih sebatas memberikan motivasi, komite hanya memberi dukungan, c) peran komite sebagai pengontrol belum begitu menyentuh langsung ke sekolah.

Kata Kunci: Peran Komite Madrasah, Peningkatan Mutu, MTS.s Moti Verbond

Cara sitasi:

Boko, Y., A & Djaguna, F. (2023). Peran Komite Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MTs.S Moti Verbond, Ternate, 10 (1), 37-46

Sejarah Artikel:

Dikirim 08-12-2022, Direvisi 18-01-2023, Diterima.26-01-2023

PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang dihadapi pendidikan modern ialah partisipasi masyarakat. Masyarakat menjadi subsistem sekolah yang semestinya dilibatkan dalam setiap kebijakan kepala sekolah. Partisipasi masyarakat memudahkan sekolah dalam membangun mutu. Lahirnya Komite Madrasah merupakan tuntutan atas desentralisasi pendidikan.

Komite Madrasah merupakan badan yang bersifat mandiri dan tidak mempunyai hirarkis dengan Madrasah atau pun lembaga pemerintahan lainnya. Komite Madrasah di masing-masing satuan pendidikan memiliki kemandirian masing-masing, namun tetap menjadi mitra pemerintah karena harus bekerjasama sejalan dengan Otonomi Manajemen Madrasah (OMS).

Karakteristik desentralisasi Madrasah mengandung prinsip otonomi, Prinsip fleksibilitas, prinsip partisipatif dan Prinsip partisipatif diartikan sebagai penciptaan lingkungan terbuka serta demokratis, warga Madrasah yaitu guru, siswa, karyawan dan masyarakat didorong agar terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan mutu pendidikan, dan, prinsip inisiatif.

Komite Madrasah merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi serta memprakarsai masyarakat untuk melahirkan kebijakan operasional maupun program Madrasah. Selain itu, kehadiran komite Madrasah dapat meningkatkan tanggungjawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, guna terwujud suasana dan kondisi transparan, akuntabilitas, demokratis dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Mutu atau sering diistilah dengan nama kualitas merupakan gambaran karakteristik yang menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan pihak pengguna mutu. Berkaitan dengan itu, mutu Madrasah senantiasa merujuk pada spesifikasi pelayanan pendidikan yang sesuai dengan tujuan atau manfaat dari pada pendidikan itu sendiri. Maka makna mutu pendidikan mengarah pada penggunaan jasa pendidikan, namun bukan berarti mutu pendidikan tidak memiliki standar. Nah mutu pendidikan sendiri berpatokan pada SNP (Sujdarwo 2011).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (BSNP), merumuskan standar atau kriteria minimal sebagai acuan mutu dalam satuan pendidikan yakni:

- a) standar kompetensi lulusan,
- b) standar isi,
- c) standar proses,
- d) standar pendidik dan kependidikan,
- e) standar SARPRAS,
- f) standar pembiayaan, dan
- g) standar penilaian pendidikan.

Penelitian di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto menunjukkan bahwa peran komite madrasah sebagai;

- a) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*), komite madrasah sebagai mitra dari kepala satuan pendidikan telah memberikan pertimbangan dalam tiap rancangan serta program yang telah disusun oleh sekolah,
- b) Pendukung (*supporting agency*), peran komite sebagai badan pendukung dalam peningkatan mutu dapat berupa dukungan finansial, seperti tenaga, dan dukungan pikiran (komite ikut membantu serta menunjang SARPRAS satuan pendidikan),

- c) pengontrol (*controlling agency*), komite melakukan kontrol atau pengawasan pengambilan keputusan kepala sekolah atau perencanaan pendidikan di satuan pendidikan, d) serta sebagai mediator (*executive*) komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah, orang tua dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua siswa semuanya itu melalui komite sekolah (Basri 2021).

Hasil penelitian lain di MAN 1 Palembang, peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu sudah baik, tentu dilihat dari peningkatan sarana prasaranan di satuan pendidikan. Komite sekolah sangatlah berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang karena komite memiliki beberapa peranan yang harus dijalankan untuk sekolah, seperti pemberi pertimbangan (*advisory agency*), dalam setiap perencanaan dan program yang disusun oleh sekolah, komite sekolah. pendukung (*supporting agency*) penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Komite sebagai pengontrol (*controlling agency*) terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, serta sebagai mediator atau penghubung antara aspirasi orang tua siswa atau masyarakat terhadap pihak sekolah dan turut serta memasyarakatkan kebijakan sekolah kepada pihak-pihak yang terkait dan berwenang di tingkat daerah (Febriana 2019).

Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Negeri Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh adalah dengan membuat rapat rutin setiap tiga bulan, dan membuat rapat pada setiap akhir semester. Pada rapat kerja kepala satuan pendidikan maupun komite sekolah membahas persoalan penting berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan dan lainnya yang dianggap penting. Keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan program kerja umumnya dapat dikatakan berjalan dengan baik, di setiap penyusunan program kerja, pihak sekolah senantiasa melibatkan komite maupun dan guru-guru sehingga setiap program kerja di benar-benar diketahui oleh anggota komite. Wewenang komite sekolah tidak sama dengan kepala sekolah, termasuk dalam mengelola keuangan sekolah. Komite sekolah wewenangnya hanya sebatas memberikan masukan-masukan atau pertimbangan tertentu berkenaan dengan program sekolah. Wewenang komite sekolah memang sudah baik, namun belum optimal terutama dibidang pengelolaan keuangan (Sakdiah & Zamzami, 2018).

Peneliti ini, didahului dengan melakukan observasi di MTS.s Moti Verbond guna memastikan keberadaan komite. Perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama memotret peran sedangkan perbedaannya pada kendala. Seperti penelitian Risdani dan Syamsurijal Basri, Lilys Febriana dan Sakdiah dan Zamzami meneliti tentang peran dan pemberdayaan komite sekolah. Tiga penelitian di atas hanya memotret tentang peran sedangkan penelitian ini memotret, 1) peran komite MTS.s Moti Verbond, seperti pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), dan mediator (*mediator agency*) dalam meningkatkan mutu pendidikan, maka 2) penelitian ini juga memotret kendala yang dihadapi Komite MTS.s Moti Verbond. Urgennya penelitian ini, yaitu selain memotret peran yang dilakukan komite secara umum, maka penelitian ini mengkhususkan pada kendala yang belum dikaji oleh peneliti sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni jenis penelitian yang mengungkapkan realitas yang sebenarnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Sujdarwo 2011). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menyajikan data berupa kata-kata atau informasi dari orang-orang yang diamati. Subjek penelitian ini adalah komite sekolah dan guru. Penelitian ini dilaksanakan pada Komite MTS.s Moti Verbond dari 10 s.d 16 Agustus 2022. Sekolah tersebut berada di kelurahan Tadenas Kecamatan Moti, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara lisan dari informan atau narasumber. Sumber data sekunder antara lain surat-surat,

artikel, buku-buku, foto/gambar dan lain-lain. Jenis sumber data penelitian antara lain informan atau narasumber, tempat dan peristiwa, arsip dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: (1) wawancara, yaitu pengumpulan data atau informasi dengan cara melalui percakapan antara pewawancara (peneliti) dengan yang diwawancarai (narasumber). (2) observasi. Observasi yang dilakukan adalah untuk memperoleh data tentang keadaan yang sebenarnya dilapangan yaitu tentang peran Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTS.s Moti Verbond, dan (3) studi dokumen. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data/informasi dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

Pengujian keabsahan data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah proses pengecekan data/informasi penelitian dari berbagai sumber dengan berbagai cara untuk menghasilkan data yang akurat. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber/data, dan triangulasi metode. Teknik analisis data mencakup tiga kegiatan, yaitu (1) reduksi data (2) penyajian data (3) penarikan kesimpulan (PKM Dati Kec n.d.).

Proses analisa data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dengan metode wawancara, pengamatan, dan studi dokumen. Reduksi data yaitu kegiatan mengolah data mentah yang dikumpulkan, diringkas, disistematiskan, sehingga mudah dipahami dan dicermati. Setelah reduksi, kemudian penyajian data atau informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik dan pengambilan tindakan, yang disajikan dalam bentuk teks naratif, bagan, matriks dan gambar. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Penarikan Kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian dan penerikan simpulan memberikan gambaran yang jelas tentang mengenai objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Komite MTS.s Moti Verbond

a. Peran Komite Sebagai Badan Pemberi Pertimbangan (*Advisory Agency*)

Komite Madrasah lahir dari Permendiknas Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah yang kemudian direvisi ke dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Komite Madrasah dituntut untuk mendirikan Otonomi Manajemen Madrasah (OMS), tugas Komite Madrasah adalah membantu madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peran komite MTS.s Moti Verbod dalam memberikan pertimbangan dapat dilihat dari penjelasan berikut:

“Peran komite Madrasah Tsanawiyah swasta (MTS.s) Moti Verbond dalam pemberian pertimbangan yaitu: Kami menghadiri rapat Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAS) dengan kepala Madrasah dan dewan guru MTS.s Moti Verbond. Rapat ini merupakan wewenang madrasah bukan komite. Hal ini dikarenakan Komite Madrasah ialah representasi orang tua siswa” (Wawancara, KM 10 Agustus 2022).

Dalam rapat tersebut dibahas pula Rencana Induk Pengembangan Madrasah (RIPS). Posisi komite madrasah ialah memenuhi undangan kepala MTS.s Moti Verbond. Dengan kehadiran komite madrasah, maka secara tidak langsung madrasah telah memenuhi asas transparansi. Kepala Madrasah membuka ruang untuk memberi saran atau masukan terkait RKS dan RIPS, dari saran itu kemudian didiskusikan tentang penggunaan anggaran sehingga tidak ada masalah dikemudian hari.

Penjelasan di atas selaras dengan Dearlina Sinaga, (2017) bahwa peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan, diharapkan mampu memberi masukan atas kriteria kinerja sekolah agar dapat membangun peningkatan proses belajar mengajar di sekolah. Rencana kegiatan yang dibahas kemudian disahkan secara bersama antara kepala madrasah, dan komite madrasah.

Anantara komite madrasah dan satuan pendidikan terbentang jalur koordinasi bukan pertanggungjawaban. Hal ini membuat komite harus menghargai otonomi kepala madrasah. Komite madrasah merupakan komponen masyarakat yang terdiri atas orang tua siswa, guru dan *stakeholders* lain.

Ketika ditanyakan terkait substansi dari peran komite MTS.s Moti Verbond dalam meningkatkan mutu pendidikan:

“Komite MTS.s Moti Verbond memiliki peran sebagai pemberi pertimbangan dalam menentukan kualifikasi pendidik saat ada kekurangan guru, walaupun tidak secara total namun yang menentukan ialah komite, bersama dengan pihak madrasah, komite ikut membantu dalam memberi pertimbangan tentang permintaan tenaga guru. Hal ini merupakan wujud dari partisipatif komite berupa memberi pertimbangan atau pemberian saran atas kualifikasitenaga guru yang dibutuhkan oleh madrasah (Wawancara, KM 10 Agustus 2022)”.

Dilakukan Komite MTS.s Moti Verbond ialah membantu madrasah dalam meningkatkan mutu satuan pendidikan dengan cara menghormati peran kepala madrasah. Komite madrasah selalu menunggu konfirmasi madrasah apabila hal-hal tersebut masuk dalam kewenangan kepala madrasah, apabila berhubungan dengan peran serta masyarakat, maka madrasah tetap meminta bantuan kepada komite karena tugas komite salah ialah mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun mutu pendidikan.

Penjelasan komite di atas didukung oleh penelitian Latief Surjana, (2017) diketahui kalau pihak sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah membuat rancangan kerja serta anggaran sekolah setiap tahun yang sudah dikaji berdasarkan hasil analisa agar mewujudkan visi misi satuan pendidikan secara bersamaan yang kemudian dirumuskan pada rencana kerja dan anggaran satuan pendidikan. Komite madrasah berfungsi memberikan pertimbangan terhadap segala kebijakan dan program yang telah dibuat oleh sekolah. Penyusunan program kerja telah dilakukan sekolah sehingga komite hanya memberikan pertimbangan program kerja dan juga menjalankan program yang telah ada.

Agar dapat meningkatkan peran masyarakat dalam satuan pendidikan, menurut (Boko and Safi 2022) komite ialah wadah yang dapat mengorganisir pandangan, aspiratif serta menggali potensi warga masyarakat agar dapat menjamin demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas. Lembaga tersebut ialah komite madrasah yang bertempat di satuan pendidikan.

“Komite madrasah dalam melakukan rapat dalam pemberian pertimbangan kepada madrasah agar memberi pertimbangan tentang sekolah tatap muka ialah: *Pertama*, madrasah harus terus menyediakan *hensaniteiser* dan cuci tangan yang memenuhi standar kesehatan dalam proses pembelajaran. *Kedua*, madrasah harus tetap berkomunikasi dengan gugus tugas apabila siswa terindikasi penyakit, misalnya pusing dll. *Ketiga*, guru dan siswa harus jaga jarak dan memakai masker (Wawancara, KM 10 Agustus 2022)”.

Komite madrasah memang memiliki peran penting selain meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberian pertimbangan. Komite MTS.s Moti Verbond memberikan masukan sekaligus pertimbangan agar proses pembelajaran harus mengikuti protap kesehatan di waktu pandemi kemarin. Hal ini untuk menjaga keselamatan bersama terutama pendidik dan peserta didik.

b. Peran Komite Sebagai Badan Pemberi Pendukung(Supporting Agency)

Ketika madrasah membutuhkan beberapa guru mata pelajaran, maka komite dengan senang hati bersama-sama dengan kepala madrasah untuk mendiskusikan beberapa hal, sebagaimana hasil wawancara:

“1) Madrasah membutuhkan guru honor, namun terkendala dengan biaya atau gaji guru honorer,

- 2) Solusi untuk mengatasinya seperti apa dan bagaimana? Mengingat madrasah ini merupakan madrasah swasta dan jelas anggaran menjadi beban sendiri bagi Kepala Madrasah dan Yayasan (Wawancara, KM 13 Agustus 2022)".

Hasil diskusi di atas menegaskan kalau komite MTS.s Moti Verbond sangat mendukung kebijakan madrasah dalam meningkatkan layanan mutu pendidikan. Komite bersama dengan Kepala Madrasah kemudian melakukan rapat dengan orang tua siswa dan membicarakan seputaran teknis pembiayaan. Hal yang tidak mungkin memang kadang dimungkinkan oleh madrasah karena atas dasar kesepakatan bersama antara madrasah, komite dengan orang tua siswa.

Bagi Madrasah Negeri setara MTS uang semesternya gratis tetapi bagi madrasah swasta seperti MTS.s Moti Verbond sangatlah berat. Banyak orang mengasumsikan kalau madrasah swasta sebagai sekolah rakyat sedangkan madrasah negeri sebagai madrasah pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bantuan diberikan pemerintah kepada madrasah negeri ketimbang madrasah swasta.

Selain pemberi dukungan berupa pemberi pertimbangan di atas, dalam meningkatkan mutu sarana pendidikan juga dapat dilihat:

"MTS.s Moti Verbond biasanya mendapatkan anggaran rehabilitasi gedung dari Kemenag Kota Ternate. Anggaran itu dipakai untuk membayar honor guru sedangkan kerja fisiknya ialah komite dan orang tua siswa (Wawancara, KM 13 Agustus 2022)".

Prinsipnya ialah Komite MTS.s Moti Verbond mengedepankan koordinasi dari pihak madrasah. Komite memberi dukungan kepada madrasah demi meningkatkan mutu. Pemeliharaan SARPRAS madrasah merupakan kegiatan dalam pengurusan serta pengaturan keadaan satuan pendidikan yang digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna mencapai tujuan pendidikan. Pemeliharaan SARPRAS merupakan kegiatan merawat dan pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut dalam kondisi baik dan siap digunakan.

Pemeliharaan dimulai dari pemakaian atau penggunaan barang. Sebagai madrasah swasta, menurut ketua komite: MTS.s memang membutuhkan perhatian pemerintah terutama terkait pemeliharaan. Apabila hanya mengandalkan keuangan Yayasan, sangat tidak mungkin. Komite MTS.s Moti Verbond dalam mendukung mutu dapat dilihat atas penjelasan komite:

"Untuk meningkatkan mutu madrasah maka komite madrasah ikut memberi dukungan moril kepada siswa-siswa yang mengikuti kompetisi Sains Madrasah di Ternate untuk tingkat MTS seKota Ternate. Hal ini harus didukung demi mempertahankan dan meningkatkan mutu MTS.s Moti Verbond (Wawancara, KPSK 14 Agustus 2022)".

MTS.s Moti Verbond selalu mengikuti kompetisi ditingkat sekolah di Ternate, bahkan mendapat juara. Hal ini bukan tanpa alasan melainkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memperlihatkan kepada MTS Negeri dan swasta bahwa kami bisa menjadi terbaik.

Pernyataan kepala MTS.s Moti Verbond:

"Dalam menjaga dan meningkatkan mutu madrasah, selain mengirim siswa kami juga mendorong tenaga pendidik mengikuti kegiatan Diklat Di Wilayah Kerja (DDWK) tahun 2018 dan 2019 yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Manado. Hal ini kami lakukan sebagai bentuk menjaga mutu madrasah, dan melawan stigma tentang sekolah swasta tidak memiliki tenaga pendidik yang berkompeten (Wawancara, KPSK 14 Agustus 2022)".

Di MTS.s Moti Verbond sendiri ada beberapa guru honorer yang luar biasa hebat yang membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan eksternal, terutama mutu madrasah. Dalam kegiatan ini, komite juga dikoordinasikan karena komite madrasah merupakan mitra dan memiliki andil dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan mutu. Jadi ada dorongan juga dari komite untuk guru-guru di MTS.s Moti Verbond.

c. Peran Komite Sebagai Badan Mediator (*Mediator Agency*)

Peran komite dalam mediator: “Ada kegiatan Maulid yang digagas OSIS dan Ikatan Alumni MTS.s Moti Verbond dua tahun lalu. Disini saya memfasilitasi mereka agar dapat melakukan rapat dengan masyarakat. Dan itu saya lakukan sebagai bukti rasa cinta dan peduli terhadap MTS.s Moti Verbond. Kegiatan itu dilaksanakan sebelum pandemi covid-19 (Wawancara, KM 16 Agustus 2022)”.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), disebutkan dalam bagian ketiga pasal 8, berbunyi: Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Pasal 9 dijelaskan: Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam pertemuan lain, komite madrasah pernah melakukan mediasi antara sekolah dengan Ketua Yayasan MTS.s Moti Verbond, hasilnya:

“Dalam pertemuan itu membahas tentang krisis siswa dan guru yang dialami MTS.s Moti Verbond. Kurangnya guru dan pidaahnya guru PNS dari MTS.s Moti Verbond ke MTS lain di Ternate (Wawancara, KM 16 Agustus 2022).

Rapat ini komite madrasah lebih memposisikan sebagai mediator, artinya komite MTS.s berupaya untuk mencari format terbaik guna memecahkan problem sekolah. Hasil mediasi ini hanya melahirkan pandangan-pandangan dari masyarakat maupun Yayasan. Namun atas keinginan yang kuat oleh kepala sekolah dan komite madrasah maka sekolah ini masih berjalan sampai sekarang. Kepala MTS.s Moti Verbond, mengemukakan bahwa:

“MTS.s Moti Verbond memang memiliki tiga guru PNS, tetapi ada yang sudah pindah dan sekarang hanya ada dua guru PNS karena satu guru sudah pindah ke Ternate. Guru yang memegang data Dapodik kami ialah guru honorer, dan sangat membantu kami. MTS.s Moti Verbond merupakan satuan pendidikan di Kecamatan Moti yang terakreditasi B. Ini luar biasa, namun pada perkembangannya kami harus terus membenah agar tidak ketinggalan dengan sekolah lain (Wawancara, KM 16 Agustus 2022)”.

Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTS.s) Moti Verbond bila dilihat perkembangannya, maka sekolah ini bisa dikategorikan sebagai sekolah dengan pelayanan pendidikan yang baik. Mutu pendidikan itu dapat dipertaruhkan melalui akreditasi sekolah, suatu kebanggaan luar biasa karena akreditasinya B ketimbang sekolah lain di Kecamatan Moti. Oleh karena itu, untuk mempertahankan mutu, komite madrasah dan kepala MTS.s Moti Verbond mengagendakan rapat dengan Ketua Yayasan dan Masyarakat Kelurahan Tadenas.

d. Peran Komite Sebagai Badan Pengontrol(*Controlling Agency*)

Peran komite sebagai pengontrol pada satuan pendidikan di MTS.s Moti Verbond:

“Fungsi pengotrol memang secara langsung memang tidak. Hal ini karena ada pengawas internal dari pihak Kemenang Kota Ternate. Jangan sampai terjadi tumpah-tindih kewenangan dan kami menghargai itu, meskipun demikian, kami tetap melihat MTS.s Moti Verbond sebagai bagian tak terpisahkan dari komite madrasah (Wawancara, KM 16 Agustus 2022).

Komite MTS.s Moti Verbond memang secara pengotrolan belum berjalan karena fungsi pengawasan biasanya dilakukan oleh Kemenag. Itu artinya kalau komite madrasah sangat selektif dalam melihat mana ranah madrasah dan mana ranah komite. Kebanyakan komite menjadikan posisinya sebagai jalur politis, di mana kebijakan pemerintah selalu diintervensi, seperti mobilisasi siswa dan orang tua siswa dalam penolakan kepala madrasah.

Kepala MTS.s Moti Verbond: Peran pengontrol komite MTS.s Moti Verbond lebih khususnya dalam hal perencanaan RKAS dan RIPS. Tidak secara menyeluruh, ada masalah-masalah lain yang membatasi fungsi kontrol komite, seperti anggaran pendidikan karena komite dan MTS.s Moti Verbond hanya sebatas jalur koordinasi.

Hal senada disampaikan Boko dan Saleh, (2021: 211), tugas sekolah ialah untuk menyusun

rencana dan program; sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan, sekolah bertanggungjawab dalam menentukan kebijakan pendidikan sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS); dalam fungsinya sebagai pelaksana pendidikan yang otonom, sekolah berperan dalam penyusunan RAPBS setiap akhir tahun ajaran untuk digunakan dalam tahun ajaran baru. Kepala MTS.s Moti Verbond menegaskan bahwa:

“Komite MTS.s Moti Verbond sebenarnya secara tidak langsung telah melakukan fungsi pengontrolan bagi pelaksanaan pembelajaran di madrasah, misalnya dalam pengambilan buku raport semester ganjil/genap komite selalu diberikan ruang untuk menyampaikan dorongan kepada orang tua peserta didik agar selalu menjaga anak untuk keluar malam serta memantau jam belajar anak-anak (Wawancara, KPSK 16 Agustus 2022)”.

Disini bisa dikatakan komite ekstra hati-hati dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Komite selalu dilibatkan disetiap pengambilan buku raport dengan harapan komite dapat memberikan masukan kepada orang tua siswa. Dalam menghadapi UN komite diundang untuk membicarakan tentang kesiapan-kesiapan sekolah.

Nurhasanah et al., (2021) komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, pendidikan sekolah, dan pendidikan luar sekolah.

Ketika kami menanyakan kepada salah satu guru tentang komitmen komite madrasah: “Sejauh ini koordinasi komite dengan sekolah berjalan baik. Namun, masih bersifat motivasi belum pada tindakan yang lebih kongkrit. Harapan kami ialah Komite Madrasah dapat menjalankan perannya sesuai dengan program yang disusun sesuai program komite. Dan lebih memaksimalkan sumber dayanya untuk membantu kami, terutama terkait kekuarangan siswa (Wawancara, GR 16 Agustus 2022).

Mutu penting dan perlu untuk dikontrol serta didukung oleh komite madrasah. Komite madrasah harus memiliki peran dalam mengontrol mutu, itu artinya keterlibatan secara langsung komite sangat diharapkan oleh para pendidik di MTS. S Moti Verbond.

2. Kendala Komite MTS.s Moti Verbond

Dari temuan peneliti: ketua komite bukan dipilih melalui musyawarah tetapi melalui penunjukkan atau pengangkatan. Hal ini menjadi kendala apalagi mereka tidak mengerti tentang peran dan fungsi komite madrasah. Sewaktu peneliti menanyakan kepada ketua komite madrasah: “Kami tidak memiliki AD/RT dan saya tidak memiliki bendhara dan sekretaris komite. Namun, mereka tidak aktif sehingga rapat bulan tidak dapat berjalan (Wawancara, KM 16 Agustus 2022).

Hal ini ditegaskan juga Irawan et al., (2021) pada prosesnya ditemukan disfungsi pada salah satu atau lebih tugas komite sekolah di beberapa sekolah. Misalnya yang terjadi disalah satu satuan pendidikan di Kota Banda Aceh, peran komite yang berjalan dengan tepat hanyalah pada peran sebagai penggalang dana.

Dalam menjaga mutu, kita membutuhkan yang namanya *Total Quality Control (TQC)*. Mutu harus dikontrol bagaimana komite bisa mengontrol mutu kalau sumber dayanya tidak tersedia. Selain itu, ada kendala dalam peran: 1) peran komite MTS.s Motiverbond sebagai pemberi dukungan. Dukungan komite masih sebatas motivasi belum menyentuh pada aspek sumber daya dan kemandirian finansial. 2) peran komite sebagai pengontrol dalam amatan peneliti masih dalam hal yang belum urgen. Komite Madrasah harus memiliki indikator sendiri dalam menilai mutu, bukan sekedar pernyataan.

Hanya ada dua peran Komite Madrasah yang berjalan, yakni 1) peran komite MTS.s Moti Verbond sebagai mediator bisa dikatakan berjalan meski masih banyak kekurangannya. Di katakan kekurangan karena, sampai saat ini masalah kekurangan siswa belum dipikirkan oleh komite. 2)

peran komite sebagai pemberi pertimbangan telah berjalan dengan baik, di mana sekolah selalu memberikan saran dan masukan pada saat rapat penting, seperti kegiatan RKAS dll.

Dalam amatan peneliti kendala eksternal lain ialah masyarakat atau orang tua siswa agak bergeser paradigmanya. Dari tahun 2000-an di mana Pemerintah Kelurahan masih dipegang oleh Alm. Haji Rusly, terasa sekali masyarakat saling bahu-membahu dengan Yayasan untuk mendirikan MTS.s Moti Verbond. Bahkan masyarakat dengan ikhlasnya bersama Komite Madrasah menyediakan rumah warga bagi anak-anak di luar daerah yang mau masuk di MTS.

Kesadaran masyarakat yang agak bergeser menjadi kendala tersendiri bagi partisipasi dalam membangun mutu madrasah. Sejak lurah lama Alm. Haji Rusli dan ketua Yayasan Sulaiman, MTS.s Moti Verbond masyarakatnya bahu membahu untuk membangun gedung sekolah (Wawancara, KPSK 16 Agustus 2022). Dalam amatan, MTS.s Moti Verbond mengalami banyak perubahan yang sangat disayangkan. Banyak perdebatan antara masyarakat bahwa sekolah ini harus di negerikan tanpa mempedulikan jumlah siswanya. Tenaga pendidik yang mengandalkan guru honorer tanpa ditopang oleh masyarakat menjadi beban bagi sekolah yang menyandang status swasta. Komite madrasah memang harus bekerja keras dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan mengetahui tugas pokoknya.

Pengangkatan komite madrasah melalui musyawarah mufakat dan pada akhirnya struktur pengurusan tidak dibentuk. Hal ini menjadikan beban bagi komite madrasah karena tidak mungkin ia hanya sendiri menjalankan program. Belum lagi lemahnya sosialisasi tentang peran komite madrasah sehingga perannya terkesan sangat administratif. Komite madrasah semacam hanya sebagai pajangan, tugasnya hanya sebatas memberikan arahan di waktu pengambilan buku raport. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Pasal 6 ayat (1) Anggota komite sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa. (2) Susunan kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara (Permendikbud 2016).

Solusi dalam menghadapi kendala ialah komite madrasah dan pihak sekolah harus saling berkoordinasi antara satu dengan lain. Sehingga mutu madrasah dapat berjalan dengan baik. Komite madrasah harus mengetahui tugas pokok dan fungsinya, sebaliknya sekolah pun demikian. Kepala madrasah diharapkan dapat memanfaatkan komite sebagai panjang tangan dari masyarakat pada satuan pendidikan.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, ditemukan peran Komite MTS.s Moti Verbond dalam meningkatkan mutu ada yang berjalan dengan baik, namun mengalir sesuai kondisi saja, seperti:

- 1) Peran komite sebagai mediator bisa dikatakan berjalan meskipun masih banyak kekurangan. Kekurangan karena sampai saat ini masalah kekurangan siswa belum dipisahkan oleh komite. Komite MTS.s Moti Verbond harus banyak melakukan studi banding di sekolah yang komitennya bisa dikatakan sukses dalam mendorong mutu,
- 2) Peran komite sebagai pemberi pertimbangan telah berjalan dengan baik, di mana sekolah selalu memberikan saran dan masukan pada saat rapat penting, seperti kegiatan RKAS. Namun harus disertai dengan program-program komite yang menjadi representasi dari orang tua siswa dan masyarakat.

Kendala yang dihadapi Komite MTS.s Moti Verbond dalam menjalankan peran sebagai pemberi dukungan ialah komite masih sebatas memberikan motivasi, seperti kegiatan Diklat Di Wilayah Kerja (DDWK) tahun 2018 dan 2019 yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Manado. Menurut kepala madrasah, peran komite hanya sebatas mendukung. Komite harus memiliki kelincahan dalam mengelola keuangan sendiri. Peran komite sebagai pengontrol dalam amatan peneliti masih dalam hal yang belum begitu menyentuh langsung ke sekolah. Komite MTS.s harus

memiliki indikator sendiri dalam menilai mutu bukan sekedar pernyataan atau memberi dorongan semata. Hal ini karena mutu merupakan hal yang dinamis ia bergerak maju bukan mundur ke belakang.

Komite harus didudukkan secara organisasi bukan perorang sehingga kerja-kerjanya bisa berjalan. Peneliti temukan Komite MTS.s Moti Verbond salah satu kendalanya secara eksternal ialah tidak ada SDM. Hal ini dibuktikan dengan pengangkatan ketua komite dan AD/ART yang tidak dibuat dan struktur kepengurusan atau anggota tidak dibentuk. Lalu bagaimana komite bisa membangun program kalau berfikir sendiri dan bertindak sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Syamsurijal. 2021. "Optimalisasi Peran Komite Sekolah Di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto." *Administrasi, Kebijakan dan Kepemimpinan Pendidikan (JAK2P)* 2(1): 35–46.
- Boko, Yusri A, and Jamin Safi. 2022. "Kearifan Lokal Sebagai Identitas Etnik: Tradisi Salai Jin Dalam Masyarakat Tidore Kepulauan." *Jurnal Artefak* 9(1): 9.
- Lilys Febriana. 2019. "Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MAN 1 Palembang." *Jurnal PAI Raden Fatah* 1(2): 163.
- Nurhasanah, R, Bonita Bilqis, and Ausia Ariana Putri. 2021. "Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan." *Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam* 3(1): 22–32.
- Permendikbud, Nomor 75 Tahun 2016. 2016. "Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di SMP Berbasis Pondok Pesantren Pancasila." : 1–3.
"PKM Dati Kec."
- Sallis, Edward. 2012. *IRCiSoD Total Quality Management In Education: Manajemen Mutu Pendidikan*. Jogjakart.
- Sujdarwo. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Basri, Syamsurijal. 2021. "Optimalisasi Peran Komite Sekolah Di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto." *Administrasi, Kebijakan dan Kepemimpinan Pendidikan (JAK2P)* 2(1): 35–46.
- Boko, Yusri A, and Jamin Safi. 2022. "Kearifan Lokal Sebagai Identitas Etnik: Tradisi Salai Jin Dalam Masyarakat Tidore Kepulauan." *Jurnal Artefak* 9(1): 9.
- Lilys Febriana. 2019. "Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MAN 1 Palembang." *Jurnal PAI Raden Fatah* 1(2): 163.
- Nurhasanah, R, Bonita Bilqis, and Ausia Ariana Putri. 2021. "Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan." *Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam* 3(1): 22–32.
- Permendikbud, Nomor 75 Tahun 2016. 2016. "Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di SMP Berbasis Pondok Pesantren Pancasila." : 1–3.
"PKM Dati Kec."
- Sallis, Edward. 2012. *IRCiSoD Total Quality Management In Education: Manajemen Mutu Pendidikan*. Jogjakart.
- Sujdarwo. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Sakdiah, S., & Zamzami, Z. (2018). Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 2(1), 29–41.